

IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN GRATIS

Hermanto dan Zaili Rusli

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Implementation Program Guide Raskin. This study aims to determine the distribution and constraints experienced in the Raskin Program in Kelurahan Buluh Kasap, District of Dumai Eastern, Dumai City, Riau Province. The research method used is descriptive type of research that aims to be able to express the phenomena occurring in the implementation and relevance of the Raskin program with targets and supporting factors and obstacles. The results showed the division of Reed coarse Raskin in The Village, East Dumai district was based on the results of the meeting after being verified. The amount received by the poor can be categorized right number, but there is still a little short on people to accept the result of the shrinking of Raskin rice because gancu.

Abstrak: Implementasi Program Raskin Gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian dan kendala-kendala yang dialami dalam Program Raskin di Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Metode penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk dapat mengungkapkan fenomena yang terjadi dalam implementasi dan relevansi program Raskin dengan sasaran serta faktor pendukung dan kendala. Hasil penelitian menunjukkan pembagian Raskin di Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur masih berpatokan pada hasil rapat setelah diverifikasi. Jumlah yang diterima oleh warga miskin dapat dikategorikan tepat jumlahnya, namun masih ada sedikit kekurangan warga menerimanya akibat dari menyusutnya beras raskin karena gancu.

Kata Kunci: Implementasi, Program Raskin, pendistribusian, warga penerima

PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuat Program Beras Miskin (Raskin).

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang kebijakan perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi masya-

rakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Program Raskin masuk dalam kluster I program penanggulangan kemiskinan tentang bantuan dan perlindungan sosial, yang bersinergi dengan program lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan pendidikan. Sinergi antara berbagai program pemerintah ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam mencapai tujuan.

Efektifitas Program Raskin 2011 ditingkatkan melalui koordinasi antar lembaga/instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui sebagian pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasarannya adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS-11) Badan Pusat Statistik (BPS), dalam mencukupi kebutuhan Pangan Beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di Tempat Distribusi (TD).

Untuk mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan yang bersipat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana rumah tangga miskin tersebut berada, agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Untuk itu BPS melaksanakan Pendataan RTS Tahun 2011, yang disebut dengan Coklit RTS Tahun 2011. Variabel yang digunakan oleh BPS dalam menentukan ukuran kemiskinan dalam mendapatkan beras ada beberapa variable yang digunakan, yaitu kondisi perumahan, kemampuan daya beli, pekerjaan serta aset rumah tangga/keluarga.

Pendistribusian Raskin Disamping itu juga mengenai implementasi terhadap pendataan yang dilaksanakan serta konflik yang timbul akibat penentuan penerima raskin tersebut dan upaya penyelesaiannya, manfaat yang diperoleh rumah tangga sasaran melalui program raskin yang digulirkan pemerintah untuk masyarakat miskin.

pada saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan, hal tersebut dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

- a. Pendistribusian raskin di Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu.
- b. Tidak samanya data penerima raskin dengan data yang dikeluarkan oleh BPS
- c. Akibat dari perbedaan data tersebut, maka banyak penerima raskin yang layak tidak mendapatkannya begitu juga sebaliknya.
- d. Upaya yang harus dilakukan dalam pengelolaan raskin kedepan agar lebih baik

Pada masa sekarang ini kebijakan lebih sering digunakan dalam tindakan-tindakan serta Kegiatan Pemerintah seperti perilaku Bangsa dan Negara pada umumnya. Menurut Ekowati (2006) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip dan tindakan yang dilakukan oleh suatu Pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subjek atau krisis. Subarsono (2006) mengungkapkan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan .

Hasil buah pikiran (Thoha, 2001) tersebut kemudian digunakan oleh Harold Lasswell seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin yang tak terpisahkan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Nugroho (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

Adapun kebijakan publik yang dirumuskan oleh Thoha (2002) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dengan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Variabel Isi Kebijakan mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci
- f. Apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai

Sedangkan variable Lingkungan Kebijakan mencakup :

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian dan kendala-kendala yang dialami dalam Program Raskin di Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur.

METODE

Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif, bertujuan untuk dapat mengungkapkan fenomena yang terjadi dalam Implementasi Raskin, relevansi program Raskin dengan sasaran serta faktor pendukung dan kendala. Dalam penelitian deskriptif, gambaran atau fenomena suatu realitas sosial yang kompleks dapat dihasilkan dengan secara lebih spesifik dan mendetail. Newman (1997) mengemukakan “*Descriptive research present picture of specific details of a situation, social setting or relationship*” (Penelitian deskriptif menyajikan gambaran dari detail dan seluk beluk yang spesifik tentang situasi, seting sosial atau relasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Raskin Gratis

Isi Kebijakan

1. Pemahaman Kepentingan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, sering tidak tepat karena mementingkan kelompok-kelompok tertentu (subyektif), pembagian jatah raskin tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, karena berdasarkan data hasil rapat koordinasi dengan Tim TKPK.
2. Manfaat raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Program Raskin gratis ini dinilai sangat bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin, namun akibat masih adanya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh penerima manfaat untuk mengangkut beras kerumah, maka warga berharap agar program gratis yang dicanangkan oleh pemerintah kota sampai ketitik rumah tangga sasaran.

3. Perubahan kondisi Rumah Tangga Sasaran (RTS) setelah mendapatkan Raskin

Sebagian besar Rumah Tangga Sasaran (RTS) merasakan bahwa pembagian beras kepada warga miskin mempunyai manfaat minimal satu bulan.
4. Ketepatan Sasaran Pembagian Raskin

Ketidaktepatan sasaran didukung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak valid, karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan pihak Kelurahan dan Ketua RT serta Tokoh masyarakat setempat.
5. Kejelasan Implementor tentang Program Raskin

Implementor cukup paham dengan tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan yang diinginkan, akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapat Raskin.
6. Kualitas dan Kuantitas SDM sebagai Implementor

Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsure tanggungjawab dan komitmen yang ada di tingkat Kelurahan dan RT tidak kalah pentingnya artinya.

Lingkungan Kebijakan

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Implementasi Program Raskin

Kekuasaan, kepentingan dan strategi program raskin gratis cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan dari masyarakat untuk mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kondisinya.
2. Karakteristik Rezim yang berkuasa

Kebijakan strategi pendistribusian raskin gratis berdasarkan hasil verifikasi dan pen-

dataan ulang oleh tim TKPK tidak menuai protes dari warga karena hasil dari keputusan rapat koordinasi raskin.

3. Tingkat kepatuhan dan responsive kelompok sasaran

Respon warga cukup baik dan antusias serta mematuhi keputusan rapat koordinasi raskin dalam pembagian raskin berdasarkan verifikasi ulang, meskipun ada warga yang belum patuh dengan jadwal pengambilan raskin.

Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Program Raskin Gratis

Pemerintah mengakui bahwa ada enam titik kritis atau kelemahan yang harus dibenahi dalam pengucuran bantuan Raskin Gratis di Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur, keenam titik kritis tersebut meliputi :

1. Proses pendataan oleh BPS pada Rumah Tangga Miskin
2. Proses penetapan Rumah Tangga Miskin
3. Proses pembagian beras miskin
4. Proses penyaluran bantuan
5. Proses sosialisasi
6. Proses penanganan pengaduan

Sedangkan hasil wawancara dengan informan di lapangan, kendala yang dihadapi Program raskin di Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur, yaitu:

1. Penyimpangan kualitas beras yang kadang bagus dan kadang jelek serta busuk, didikuti dengan masih adanya warga yang mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi sampai kerumah tangga sasaran sebesar Rp. 5000 untuk biaya transportasi seperti becak.
2. Pembagian kartu Raskin yang mengandung unsur subyektif sehingga tidak tepat sasaran.
3. Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari BPS tidak valid dan pendataannya yang tertutup dan tidak melibatkan pihak kelurahan dan RT sehingga ada warga miskin yang layak menerima beras miskin tidak mendapatkannya begitu juga sebaliknya sehingga menimbulkan ancaman, dan kecemburuan sosial ditengah masyarakat dan dapat menimbulkan konflik.
4. Kebijakan dari TKPK yang memberikan kuota penambahan jumlah Rumah Tangga Miskin pada tiap-tiap kelurahan sehingga

tidak semua warga miskin terakomodir dalam verifikasi yang dilakukan oleh TKPK.

5. Pengambilan Raskin yang selalu tertunda dan tidak tepat waktu oleh RTS.

SIMPULAN

TKPK memberikan kuota penambahan RTS dalam keputusan rapat koordinasi sehingga pembagian Raskin berpatokan pada hasil rapat tersebut setelah diverifikasi. Jumlah yang diterima oleh warga miskin dapat dikategorikan tepat jumlahnya namun masih ada sedikit kekurangan warga menerimanya akibat dari menyusutnya beras raskin karena gancu. Masih ditemukan warga yang mengeluarkan uang untuk biaya transportasi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Jadwal pembagian Raskin yang diundur karena pendistribusian yang menunggu dari Bulog. Ada bebrapa warga yang mengambil Raskinnya tidak sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga raskin tersebut menumpuk di gudang sementara. Sebagian kecil beras ada kutunya tetapi dengan jumlah sedikit, hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Raskin Gratis yang ditunjukkan dengan keenam indikator tersebut kurang bermanfaat.

DAFTAR RUJUKAN

Grindle Mirele S, 1986. *Policy Content and Conyext in Implementation* New Jersey: Princeton University Press.

Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra

Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. *Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin*. Jakarta

Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citra Aditya

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Peraturan Walikota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Dumai.